

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum terutama oleh Kepolisian harus ditegakkan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup terkait harus mendampingi Penegak Hukum dalam menjalankan fungsinya. Dalam skripsi ini membahas mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto. PT. Pekrin merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas dan bahan kimia dalam kegiatan produksinya. PT. Pakerin menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), baik limbah padat maupun limbah cair. PT. Pakerin juga menghasilkan limbah berupa sampah plastik yang di dalamnya tercampur bahan B3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan industri harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta-fakta dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan Lapangan. Kemudian mengolah data berdasarkan temuan di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diakhiri secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran penegak hukum terutama kepolisian dalam menangani pencemaran lingkungan oleh perusahaan memang sudah baik, dalam melakukann tugasnya kepolisian membutuhkan banyak dukungan terutama dari instansi pemerintah terkait dengan lingkungan. Dinas lingkungan Hidup dan juga Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan sudah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap PT. Pakerin. Jika sanksiadministratif tidak dijalankan maka sanksi pidana akan dijatuhkan sesuai dengan UNDang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci : Penegakan hukum, Pencemaran Lingkungan, PT. Pakerin

ABSTRACT

Law enforcement on environmental pollution must be upheld in accordance with statutory regulations. Law Enforcement, especially by police, must be upheld and the Ministry of Environment and Forestry and related Environmental Services must assist Law Enforcement officers in carrying out their functions. In this thesis discusses environmental pollution carried out by PT. Pakerin in the Regency of Mojokerto. PT. Pakerin is a company engaged in the paper and chemical industri in its production activities. PT. Pakerin produces hazardous and toxic (B3) waste, both solid and liquid waste. PT. Pakerin also produces waste in the form of plastik waste which is mixed with B3 material. Management of hazardous and toxic waste (B3) produced by industri must be guided by Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Material Waste (B3) and also Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

This type of research uses sociological juridical legal research. The approach taken is to approach the facts by looking at a legal reality in the community and the field. Then process the data based on the findings in the field and then integrate it with data obtained from the literature study and end qualitatively.

The results of this study show the role of law enforcement especially the police in handling environmental pollution by companies is already good, in carrying out its duties the police need a lot of support especially from government agencies related to the environment. The Department of Environment and also the Ministry of Environment and Forestry have imposed administratif sanctions in the form of government coercion of PT. Pakerin If administratif sanctions are not enforced, criminal sanctions will be imposed in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Pollution, PT. Pakerin

DAFTAR ISI

MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan	10
1.4. Kegunaan.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Secara Praktis	11
1.5. Keaslian	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	14
1.6.4. Metode Analisis Data	16
1.7. Lokasi Penelitian	17
1.8. Responden	17
BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	18
2.1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan Hidup	18
2.1.1. Pengertian Lingkungan hidup	18
2.1.2. Pengertian Hukum Lingkungan	20
2.1.3. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	22
2.2. Kualifikasi Pencemaran Lingkungan	25
2.2.1. Pencemaran Udara	25
2.2.2. Pencemaran Air.....	26

2.2.3. Pencemaran Tanah/Daratan	28
2.3. Industri Sebagai Subyek Pencemaran Lingkugan	29
2.3.1. Pengertian Industri	29
2.4. Limbah Industri Sebagai Obyek Pencemaran Lingkungan	31
2.4.1. Pengertian Limbah	32
2.4.2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non B3 Industri	32
2.5. Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum	34
2.5.2. Teori-Teori Penegakan Hukum	35
2.5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37
BAB III PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT PAKERIN DI KABUPATEN MOJOKERTO	42
3.1. Deskripsi Penelitian.....	42
3.1.1. PT. Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia)	42
3.1.2. Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Pakerin	47
A. Pencemaran Udara Oleh PT Pakerin.....	47
B. Pencemaran Air Oleh PT. Pakerin	56
C. Pencemaran Tanah Oleh PT. Pakerin.....	67
3.2. Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh PT. Pakerin	75
3.3. Penegakan Hukum Atas Pencemaran yang Dilakukan PT Pakerin	84
3.3.1. Perspektif Masyarakat sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	84
3.3.2. Faktor Hukum atau Subtansi yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	89
3.3.3. Peran Kepolisian Sebagai Penegakan Hukum terkait Pencemaran Lingkungan oleh PT. Pakerin	90
3.3.4. Peran Pejabat Pemerintah serta Dinas Terkait dalam menjalankan fungsi Penegakan Hukum terhadap Pencearan Lingkungan Oleh PT. Pakerin	93
3.4. Tanggapan PT. Pakerin Atas Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Oleh Perusahaannya	98

3.5.	Dampak yang Diberikan Akibat Pencemaran Lingkungan PT Pakerin.	99
3.5.1.	Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat	99
3.5.2.	Dampak Terhadap Kesehatan	100
3.5.3.	Dampak Terhadap Ekosistem	102
BAB IV	PENUTUP	104
4.1	Kesimpulan.....	104
4.1.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN		116
BIODATA PENULIS		129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya.....	122
Tabel 3. 1. Lokasi Industri yang Di pantau Di Wilayah Sungai Brantas.....	60
Tabel 3. 2. Grafik Pemantauan Air Limbah Industri PT. Pakerin Di Wilayah Sungai Brantas Tahun 2016.....	63
Tabel 3. 3. Grafik Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri Di Wilayah Sungai Brantas Tahun 2017.....	64
Tabel 3. 4. Status Mutu Air Sungai Brantas Tahun 2016	65
Tabel 3. 5. Status Mutu Air Sungai Brantas Tahun 2017	66
Tabel 3. 6. Bahan - Bahan Kimia Toksik Dalam Telur Ayam Dari Tropodo Dan Bangun (ng G-1 Lemak).....	74